

**PELAKSANAAN *CITIZEN DIPLOMACY* SEBAGAI UPAYA  
PENGUATAN IDENTITAS BANGSA di ERA *ASEAN COMMUNITY***

**Setyasih Harini <sup>1</sup>, Halifa Haqqi <sup>2</sup>**

**Staf Pengajar Ilmu Hubungan Internasional  
Universitas Slamet Riyadi Surakarta**

**ABSTRACT**

*The Regional international relation recently has been the other trend on global politic. ASEAN as a regional organization couldn't apart from challenge of global politic-economy. One effort to face globalization by the increasing participation of public through citizen diplomacy. Coomunication technology could wider opportunities of citizen to make relation with another. Relationship of culture among citizen of many countries could support diplomacy of goverment. It also strengthen national identity. Question research: how did implementation of citizen diplomacy could strengthen national identity in ASEAN Community? Purpose of this research to explain implementation of citizen diplomacy could strengthen national identity in ASEAN Community. As a qualitative research, data was collected from literature. Data analysis with data reduction, data display and verification. Object research about implementation of citizen diplomacyof culture could strengthen national identity in ASEAN Community. Result of this research that implementation of citizen diplomacy of culture could support government diplomacy and strengthen national identity in ASEAN Community.*

Key words: *citizen diplomacy*, culture, ASEAN Community

**PENDAHULUAN**

Hubungan internasional merupakan suatu yang menjadi hak dan kewajiban bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Hubungan ini terjalin dengan berdasarkan pada ketidakmampuan suatu negara dalam memenuhi semua kebutuhannya. Seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi dan tereduksinya teritori negara sebagai dampak globalisasi menggiring aktor-aktor non negara untuk mengisi peluang tersebut. Termasuk di dalamnya adalah peran anggota

masyarakat (warganegara) untuk memperluas dan memperlebar jaringan koneksi dengan sesamanya dari negara lain.

Kebudayaan menjadi salah satu bidang yang dikembangkan dalam melakukan hubungan antarwarganegara. Pada hakikatnya kebudayaan dipercaya sebagai akar identitas dan karakteristik bangsa dalam pergaulan internasional. Budaya di era *ASEAN Comunity* akan memiliki peran yang lebih penting sebab tanpa mengenal budaya dari negara lain akan sulit

bagi suatu negara untuk melakukan hubungan dan kerjasama. Nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah budaya menjadi pemandu dalam pola pikir dan perilaku dari suatu bangsa. Untuk memperlancar jalinan kerjasama antara satu negara dengan negara lain diperlukan adanya diplomasi. Pelaksanaan diplomasi yang selama ini lebih banyak dilakukan oleh aktor negara dengan perwakilannya di luar negeri kini juga mengalami pergeseran dengan dijalankan oleh para pelaku budaya.

Diplomasi yang dilakukan oleh warganegara dengan warganegara lain di luar negeri salah satunya adalah dalam bidang kebudayaan. Hal ini menarik untuk ditelaah karena di saat yang sama, isu *citizen diplomacy* diyakini mampu menyumbangkan dampak positif terhadap relasi antar bangsa. Upaya untuk memperkenalkan kebudayaan daerah ke luar negeri dilakukan dengan berbagai cara seperti pameran, korespondensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, *lobby*, kunjungan dan aktivitas – aktivitas lainnya yang terkait. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut kedepannya dapat membuka

wawasan sekaligus pemahaman terhadap keunikan dan karakter yang dimiliki negara lain sekaligus untuk meredam konflik. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk menjawab bagaimana pelaksanaan *citizen diplomacy* sebagai upaya penguatan identitas bangsa di era *ASEAN Community*.

Konsep globalisasi pada dasarnya dipahami sebagai proses transisi menuju masyarakat global yang terintegrasi. Proses transisi tersebut bukan hanya sekadar pada tataran kelompok masyarakat internasional namun menyentuh sampai masyarakat akar rumput yang kemungkinan pemaknaannya tidak begitu komprehensif. Koneksitas yang terbentuk antarmanusia di era globalisasi tersebut dapat terselenggara melalui perdagangan, perjalanan wisata, investasi, penyebarluasan budaya, dan bentuk-bentuk komunikasi lainnya yang melampaui teritori negara. Sri Suneki (2012) menjelaskan bahwa globalisasi merupakan koneksi global ekonomi, sosial, budaya dan politik yang semakin mengarah ke berbagai arah di seluruh penjuru dunia. Era inilah yang menggeser paradigma diplomasi selama ini.

Meningkatnya peluang aktor non negara untuk bergerak karena arus globalisasi tersebut juga telah mendorong adanya sikap politik yang berbeda antara publik dan negara. Kemajuan teknologi komunikasi telah mengikis situasi dimana negara dan publik domestiknya selalu memiliki kesamaan sikap. Kemajuan teknologi komunikasi memberikan ruang bagi publik untuk memiliki sikap politik yang berbeda dengan negara dan mengekspresikannya secara langsung terhadap publik di luar negara (Michael Z RN: 2013). Peran aktor non negara dalam diplomasi sudah mengalami perjalanan yang cukup panjang yakni sejak tahun 1981 oleh Joseph Montville dengan memperkenalkan konsep "*track two*" *diplomacy* (jalur kedua diplomasi). Konsep tersebut merujuk pada upaya-upaya yang dilakukan oleh aktor di luar pemerintah untuk meredam potensi konflik atau upaya-upaya resolusi atas konflik yang telah terjadi. Montville merasa perlu untuk memberikan label yang berbeda atas aksi yang dilakukan antar pemerintah dan label bagi upaya yang dilakukan oleh masyarakat atau warganegara

sebagai aktor baru di luar pemerintah.

Sementara menurut Jos Havermas (1999), "*track two*" atau jalur kedua memiliki perbedaan dengan jalur pertama. Hal ini disebabkan karena pada "*track two*" lebih memainkan peran dalam proses untuk membangun saling pengertian antara kelompok-kelompok besar masyarakat yang ada di luar negeri sementara jalur pertama terbatas pada sejumlah kecil diplomat sebagai agen perwakilan resmi suatu negara di negara lain. Jalur kedua berupaya untuk membuat jalan agar dampak dari upaya yang dilakukan dapat dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat meskipun memiliki identitas yang berbeda-beda.

Menurut Antonius Sitepu (2003), paradigma munculnya regionalisme baru dalam hubungan internasional didahului dengan adanya kepentingan kelompok dari unit-unit di dalamnya. Kepentingan kelompok tersebut sangatlah kompleks dan tidak hanya dalam tataran kenegaraan atau pemerintahan. Di sisi lain, kepentingan kelompok akan memberikan sumbangan bagi terwujudnya kepentingan nasional

masing-masing unit yang kemudian diwujudkan dalam bentuk kerjasama regional dalam satu kawasan. Kecenderungan seperti ini memerlukan kesiapan dari masing-masing unit negara dari berbagai bidang agar kerjasama regional yang terwujud benar-benar memberi manfaat. Dalam perkembangannya regionalisme selalu disertai anomali dinamika spesifik dalam tatanan geografis, politik, ekonomi, strategis, dan budaya di suatu kawasan,

Fredrik Söderbaum dalam tulisannya yang berjudul Pengantar Teori Regionalisme (menyebutkan bahwa regionalisme dalam masa globalisasi ini dikategorikan sebagai *current wave* atau *era of regionalism* yang multidimensional, kompleks, tidak stabil dan bahkan terkadang tidak tunduk pada aturan. Kondisi inilah yang melatarbelakangi semakin dinamisnya hubungan antara satu negara dengan negara lain yang terkadang dapat berujung pada konflik dan keretakan hubungan. Regionalisme sekarang tidak hanya pada lingkup negara tapi juga aktor non negara (koalisi multi aktor), ada saling ketergantungan dan interaksi masyarakat antarnegara sehingga regionalisme sekarang lebih

pluralistik dan sebagai *integrated part of human history*. Dengan demikian regionalisme sekarang diarahkan untuk mengintegrasikan masyarakat yang ada di dalam kawasan tertentu dalam berbagai bidang kehidupan. Melalui pengintegrasian tersebut secara bertahap dan berkelanjutan dapat meningkatkan nilai-nilai ekonomis menuju pada perubahan kesejahteraan masyarakat.

Era regionalisme yang ada di kawasan Asia Tenggara terwujud melalui ASEAN *Community*. ASEAN merupakan sebuah kesepakatan sebagai hasil dari *Declaration of ASEAN Concord II* di Bali pada 7 Oktober 2003 (Nuraeni, 2010). Kesepahaman antarnegara tersebut secara lambat laun dapat mengurai berbagai permasalahan yang melibatkan banyak negara. Di sinilah aktor non negara diharapkan mampu berpartisipasi dan memberikan kontribusi positif terhadap dinamika hubungan antarnegara dalam satu kawasan. Aktor domestik non negara perannya dapat dibagi dalam 3 kategori, yaitu, target, partner dan independen. Dua kategori pertama biasanya ditemukan dalam studi diplomasi publik yang

masih memberikan ruang besar bagi negara baik dalam pembuatan kebijakan dan implementasi kegiatan. Kategori ketiga ditemukan dalam studi *citizen diplomacy* yang secara konseptualpun masih banyak menghadirkan negara di dalamnya

Di sini, budaya yang melekat pada setiap komponen masyarakat memberi peluang besar dalam upaya menjembatani ketidaksalingpahaman antara satu komunitas dengan komunitas lain. Publik atau masyarakat Indonesia sudah saatnya turut memperkenalkan budaya nusantara pada ranah regional guna meningkatkan saling memahami satu dengan yang lain. Upaya oleh individu dan kelompok atau dimensi domestik tersebut tidak selalu sejalan dengan apa yang menjadi tujuan dan pemerintah dalam diplomasi. Kegiatan semacam ini lebih dikenal dengan *citizen diplomacy*.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk kualitatif yang di dalamnya mengandung sebuah usaha untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian melalui perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya, secara holistik. Pendekatan kualitatif dirasa

perlu dan sesuai dengan topik yang dibahas mengenai pelaksanaan *citizen diplomacy* sebagai upaya penguatan identitas nasional di era ASEAN *community*. Pertama, melalui pendekatan kualitatif peneliti dapat memahami fenomena sosial perilaku warga negara Indonesia yang melakukan *citizen diplomacy* sebagai bentuk interaksi antarwarga dalam konteks memperkenalkan kebudayaan ke negara-negara ASEAN. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian ini, obyek atau sasaran utama adalah pelaksanaan *citizen diplomacy* yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dalam memperkenalkan kebudayaan daerah ke negara-negara Asia Tenggara. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelusuran pustaka atau *library research*. Dalam penelitian kualitatif, kegiatan analisis data sudah dimulai sejak peneliti melakukan kegiatan saat pengumpulan data berlangsung dan sampai dengan terselesainya penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

## PEMBAHASAN

*Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) merupakan salah satu dari organisasi regional yang masih bertahan hingga saat ini. Organisasi yang sekarang telah genap beranggotakan sepuluh negara ini memiliki banyak keunikan. Keunikan tersebut berkaitan dengan faktor sejarah, demografi, sistem politik dengan budayanya yang kemudian mempengaruhi pada perilaku masing-masing negara dalam kancah regional maupun internasional. Keragaman latar belakang tersebut menimbulkan potensi konflik yang dapat meretakkan hubungan sesama negara-negara Asia Tenggara.

Sebagai organisasi kawasan maka ASEAN sejak pembentukannya berusaha untuk menjadi naungan bagi keanekaragaman latar belakang yang dimiliki oleh masing-masing anggotanya. Upaya tersebut terlihat dari tujuan dari organisasi ini sesuai dengan Deklarasi Bangkok (Nuraeni, 2010) yakni: (1) Mempererat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan pengembangan budaya melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkuat

tatanan Asia Tenggara yang sejahtera dan damai. (2) Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan cara menghormati keadilan dan tertib hukum diantara negara-negara anggota serta mematuhi prinsip-prinsip sesuai Piagam PBB. (3) Meningkatkan kerjasama dan saling membantu satu sama lain dalam masalah-masalah menyangkut kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. (4) Memberikan bantuan dalam bentuk sarana latihan dan penelitian dalam pendidikan profesional, teknik, dan administrasi. (5) Kerjasama yang efektif dalam meningkatkan bidang pertanian serta industri, perluasan perdagangan komoditas perdagangan internasional, perbaikan sarana pengangkutan dan komunikasi serta peningkatan taraf hidup rakyat. (6) Memelihara kerjasama yang erat dengan organisasi-organisasi internasional dan regional yang ada dan menjajagi segala kemungkinan untuk bekerjasama secara lebih erat diantara para anggota.

ASEAN dalam perjalanannya justru memperlihatkan sebagai sebuah organisasi yang membidangi permasalahan *low politics* seperti

bidang ekonomi, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan. Dengan konsentrasinya pada *low politics* menjadikan ASEAN terlepas dari aliansi kekuatan asing ataupun pembentukan aliansi militer internal. Eksistensi ASEAN juga tidak terlepas dari kemampuannya dalam merespon globalisasi yang memberi dampak pada berbagai sektor kehidupan. Held seperti dikutip oleh Budi Winarno (2008) menjelaskan bahwa menurut kaum transformasionalis globalisasi telah menjadi sebuah kekuatan utama di balik perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat baik negara maju maupun negara berkembang. Perubahan-perubahan tersebut menyangkut pada aras sosial, ekonomi, politik yang kemudian juga merembet pada perubahan gaya hidup. Perubahan ini sekaligus menandai adanya pergeseran masyarakat menuju pada tataran kehidupan yang lebih modern dan pembentukan tatanan dunia baru. Lebih lanjut Cohn (2003) mengemukakan bahwa globalisasi merupakan “*a process that involves both the broadening and deepening of interdependence among societies and states throughout the world*”.

Dalam konteks inilah globalisasi telah membuka batas-batas nasional suatu negara bangsa. Kesepakatan yang dihasilkan dalam Bali Concord II menggambarkan upaya yang dilakukan oleh negara-negara Asia Tenggara dalam ketiga pilarnya. Ketiga pilar tersebut adalah ASEAN Political Security Community (APSC), ASEAN Economy Community (AEC), dan ASEAN Socio Culture Community (ASCC). Pilar pertama yakni ASEAN Political Security Community-APSC. Melalui komunitas keamanan tersebut, negara-negara anggota mengupayakan jalan damai dalam setiap permasalahan yang kemungkinan berujung pada ketegangan hubungan khususnya menyangkut masalah keamanan. Kesepakatan lainnya dalam hal ketahanan dan keamanan adalah saling menghormati kedaulatan nasional, menghindari ancaman ataupun penggunaan kekuatan. Jalan damai yang ditempuh negara-negara anggota juga dimaksudkan untuk mencegah eskalasi yang merembet pada terjadinya konflik. Pilar kedua adalah ASEAN Economic Community-AEC yang menjadi sebuah realisasi dari tujuan akhir

integrasi ekonomi sebagaimana yang tertuang dalam visi ASEAN 2020 namun implementasinya telah dimajukan pada tahun 2015. Sesuai dengan visi AEC untuk menciptakan ekonomi bagi negara-negara ASEAN yang lebih stabil, makmur, dan kompetitif yang disertai dengan mengalirkan lalu lintas barang, jasa, investasi, dan modal maka pembangunan ekonomi diarahkan bukan hanya pada pembangunan fisik tapi juga non-fisik. Pembangunan tersebut juga diarahkan pada pembangunan berkelanjutan yang adil untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan serta disparitas sosio-ekonomi. Selanjutnya pembentukan ASEAN *Economy Community* sekaligus memberikan peluang bagi munculnya aktor non-negara. Keterlibatan aktor non-negara bukan berarti menggeser peran pemerintah. Di sini pemerintah justru memberikan pengawasan dan pendampingan terhadap aktivitas aktor non-negara yakni para pelaku ekonomi. Kedepannya, para pelaku ekonomi dapat menjadikan ASEAN sebagai peluang dan kesempatan untuk memajukan perdagangan regional guna meningkatkan

kesejahteraan bersama negara-negara anggota ASEAN.

Pada pilar yang ketiga yakni ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) sesuai dengan visinya yang bercirikan: (1) selaras dengan tujuan pembentukan maka ASEAN berusaha menjadi organisasi yang terikat oleh satu ikatan persaudaraan. (2) Mempercepat kerjasama dalam pembangunan sosial guna meningkatkan standar kehidupan masyarakat. (3) Menjamin tercapainya peningkatan lapangan pekerjaan dengan perlindungan sosial. (4) Meningkatkan kerjasama dalam bidang kesehatan. (5) Membentuk komunitas bagi para penulis, artis atau praktisi media. (6) Meningkatkan kerjasama dalam pelestarian lingkungan hidup dan permasalahan sosial dalam masyarakat.

Ketiga pilar tersebut merupakan kesempatan sekaligus tantangan bagi Indonesia. Indonesia sebagai negara anggota ASEAN memiliki banyak potensi bagi sumber alam, tenaga kerja, maupun budaya. Dengan potensi tersebut Indonesia dapat menjadi produsen dengan mengirim produk dan jasanya ke luar negeri dengan catatan penjualan

sumber alam tersebut lebih diutamakan yang dapat diperbarukan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, diperhitungkan untuk generasi berikutnya. Pengiriman tenaga kerja hendaknya juga yang memiliki pengetahuan dan keterampilan cukup dan sesuai dengan permintaan pasar global sehingga tidak menjadi tenaga kerja untuk memenuhi ranah domestik. Pengiriman budaya dengan memperkenalkan budaya nusantara baik melalui pameran, pemberian beasiswa bagi masyarakat usia sekolah (mahasiswa) yang telah memperkenalkan budaya ke luar negeri, dan bantuan bagi masyarakat yang berhasil memberi pelatihan kepada masyarakat asing yang belajar budaya di Indonesia. Untuk mendapatkan manfaat tersebut tantangan internal seperti penegakan hukum bagi para penjahat negara harus berjalan tegas dan tanpa diskriminasi. Selain itu, pemerintah dan masyarakat hendaknya satu kata untuk menekan pencurian terhadap sumber alam sehingga generasi mendatang masih dapat menikmati. Kebijakan pemerintah yang didukung masyarakat tersebut juga terkait dengan pelestarian budaya

daerah sebagai akar dari budaya nasional.

Kebudayaan nasional sebagai identitas bangsa yang menjadi tonggak berdiri kokohnya Nusantara. Dengan adanya otonomi daerah dan globalisasi maka kebudayaan daerah hendaknya menjadi akar dan sumber dari budaya nasional. Kebudayaan daerah sekaligus membentuk jati diri dan proses regenerasi bangsa dan atas dasar itulah penting menjadi sumber pembentukan karakteristik bangsa. Kebudayaan daerah menjadi daya dukung keberadaan dan eksistensi kebudayaan nasional. Untuk itu keberadaan kebudayaan daerah perlu direposisi dan dipikirkan secara serius agar keberadaan dan peranannya dalam masyarakat Indonesia memiliki makna, perhatian dan penghargaan dalam karakteristik pluralistiknya. Melalui kebudayaan inilah menjadi salah satu cara untuk memperkuat moral seperti Jepang yang telah berhasil menjadi negara maju dengan tidak meninggalkan budayanya. Tulus Warsito mengutip pendapat dari Haviland (2007) bahwa budaya tradisi atau budaya daerah dapat menentukan norma dan perilaku yang lebih teratur,

sedangkan kesenian verbal pada umumnya meneruskan kebiasaan dan nilai-nilai budaya daerah dari sebuah bangsa. Setiap bentuk budaya daerah dapat menambah eratnya ikatan solidaritas masyarakat yang bersangkutan.

Penempatan kembali kebudayaan pada tempat yang sebenarnya dengan memberi makna dan penghargaan yang lebih pantas terutama dengan bergulirnya ASEAN *Community* menjadi sebuah kebijakan yang lebih urgen. Mengingat kembali sejarah yang telah mencatat bahwa keberadaan organisasi ASEAN dilahirkan justru dari keberagaman budaya. Bisa dikatakan menjadi sebuah keberuntungan bagi Indonesia yang terbangun dengan keanekaragaman budaya. Secara langsung maupun tidak keberadaan budaya Indonesia menjadi berkah sebab dengan pelestarian budaya semakin memperkokoh jati diri dan identitas nasional di tengah-tengah globalisasi. Pelestarian budaya dengan berbagai upaya yang tumbuh dalam kesadaran masyarakat tanpa sengaja telah menjadi sebuah aktivitas diplomasi yang mampu mendukung pemerintah.

Dengan semakin mudahnya relasi dan koneksi yang terjalin diantara warga masyarakat dari negara-negara lain telah membantu sebagian masyarakat yang memiliki ketertarikan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi pada budaya daerah. Aktivitas inilah yang menjadi *citizen diplomacy* yang semestinya mendapat dukungan lebih luas dari masyarakat terutama pemerintah. Aktivitas ini mungkin belum banyak dikenal masyarakat mengingat sejarah diplomasi yang semula berawal dari hubungan antar pimpinan entitas politik yang menjadi lebih prosedural dan protokoler. Negara bangsa atau *nation-state* sebelum memasuki globalisasi sehingga mengharuskan pelakunya untuk memahami standar prosedural dan perilaku tertentu dalam penerapan diplomasi modern Christer Jonsson dan Martin Hall (2005). Dari pendapat itu seakan menyudutkan dan meragukan keabsahan dari keterlibatan aktor non negara dalam pelaksanaan diplomasi. Keraguan tersebut cukup beralasan mengingat keberadaan aktor non negara tidak memiliki standar prosedural dan keprotokoleran ataupun legalitas seperti yang

melekat pada para aparat negara. Dari sinilah kemudian muncul konsep *citizen diplomacy* sebagai bentuk baru dan sebagai respon terhadap meningkatnya keterlibatan warga biasa dalam aktivitas diplomasi yang semula hanya dilaksanakan oleh pemerintah atau kerap dikenal dengan *first track diplomacy* (diplomasi antarpemerintah). Sherry Mueller tentang *citizen diplomacy* menyampaikan bahwa individu memiliki peran komplementer terhadap diplomasi yang dilakukan pemerintah negaranya. Lebih lanjut Mueller menjelaskan bahwa “*citizen diplomacy*” sebagai sebuah konsep yang menekankan pada adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh individu untuk membantu pembentukan hubungan luar negerinya negaranya yakni AS (Dalam Dian Mutmainah, Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol. 10 No. 2 Th. 2014). Hal ini menunjukkan bahwa peran warga dalam hubungan luar negeri diperlukan sebagai saluran untuk menangani permasalahan yang belum terjangkau pemerintah. Peran warga tersebut bisa bersifat mutlak namun juga bisa terlaksana karena

fasilitasi dari pihak lain seperti pemerintah atau pihak sponsor lainnya. Peran warga ini tidak berjalan sendiri sebab masih dalam pengawasan dan pendampingan dari pemerintah sehingga pemenuhan kepentingan nasional dapat berjalan beriringan.

Sesuai dengan tipologi citizen diplomat dari Paul maka pelaksanaan *citizen diplomacy* yang dilakukan warga melalui pameran hasil karya atau pementasan kesenian tradisional termasuk dalam tipe kedua. Menurut tipe *citizen diplomat* yang kedua, warga yang melakukan hubungan ke luar negeri tersebut terlaksana karena alasan tertentu misalnya untuk pemenuhan kepentingan ekonomi dalam tingkatan teritorial serta dalam lingkup sektoral. Dalam hal ini, peran warga tersebut dilakukan oleh konsultan profesional dan anggota komunitas sebagai aktor yang memiliki kemampuan untuk menjalankan peran tersebut. Konsultan profesional disini adalah para ahli yang kompeten dalam memfasilitasi tercapainya kepentingan ekonomi kelompok lokal maupun sektoral tersebut. Aktor- aktor inilah yang menjadi peserta aktif dalam misi luar

negeri yang dibuat pada tingkat Negara. Keterlibatan aktor-aktor tersebut menjadi semacam jalan pintas bagi terbangunnya relasi ekonomi lintas negara secara pragmatis. Jika dikaitkan dengan pelaksanaan pementasan kesenian tradisional ke luar negeri dari para warga Indonesia terlaksana karena sebuah keprihatinan. Keprihatinan akan kurangnya pemaknaan dan penghargaan terhadap kebudayaan daerah khususnya kesenian tradisional.

Pelaksanaan *citizen diplomacy* yang dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia yang peduli pada kesenian tradisional sepanjang tahun 2015-2016 termasuk dalam dua jalur. Pertama adalah secara sukarela atas inisiatif sendiri tanpa fasilitasi dari pemerintah kelompok kesenian tradisional asal Sukoharjo dengan mementaskan tarian khas Kebo Kinul di Malaysia dan Thailand. Pementasan tarian tersebut terlaksana berkat komunikasi dan relasi yang pernah terjalin dari pelatih dan pemilik sanggar kesenian ini semasa menempuh studinya di luar negeri. Kedua adalah pementasan tarian tradisional oleh Persatuan Pelajar Indonesia se-

Malaysia. Pelaksanaan pementasan tarian tersebut justru tidak dilaksanakan di negara sendiri tapi di Malaysia. Melalui kedua acara tersebut menunjukkan bahwa peran warga untuk memperkenalkan kebudayaan Nusantara ke masyarakat luar khususnya di wilayah Asia Tenggara sangat diperlukan.

#### KESIMPULAN

Saat ini ketika ASEAN *Community* telah bergulir menjadi sebuah peluang emas bukan hanya sebagai tantangan bagi Indonesia. Melalui ASEAN *Community*, Indonesia mampu menunjukkan potensinya di negara-negara Asia Tenggara. Salah satu unggulan Indonesia yang pantas diperkenalkan ke luar negeri adalah kebudayaan. Melalui perkenalan kebudayaan tersebut menjadi cara untuk melestarikan kebudayaan, memupuk relasi dan kerjasama serta mengurangi konflik dengan negara-negara lain.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bakry, Umar Suryadi. 2016. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Havermans, Joss. 1999. *Private Professionals for Peace, in People Building Peace: 35 Inspiring Stories from Around the World*, European Centre for Conflict
- Mutmainah, Dian, *Demokratisasi dalam Diplomasinya?: Sebuah Tinjauan terhadap Konsep dan Fungsi "Citizen Diplomacy"*, Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Brawijaya, Vol. 10 No. 2, 2014.
- Nuraeni, dkk, 2010. *Regionalisme Dalam Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Odoh, S.I., Nwogbaga, David M.E, *Reflection on the Theory and Practice of Citizen Diplomacy in the Conduct of Nigeria's Foreign Policy, IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 19, Issue 10, Ver. VIII (Oct. 2014)*
- RN, Michael Z. 2013. *Dari Interdependensi ke Globalisasi*. Dalam Walter Carlsnaess, Thomas Risse dan Beth Simmons. *Handbook Hubungan Internasional*. Bandung: Nusa Media.
- Sitepu, Antonius, 2003, *Konsep Integrasi Regionalisme Dalam Studi Hubungan Internasional*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (USU), Digital Library.
- Sharp, Paul. 2001. *Making Sense of Citizen Diplomats: The People of Duluth Minnesota, as International Actors*". *International Studies Perspectives*. Vol. 2.
- Söderbaum, Fredrik, 2003. *Introduction: Theories of New Regionalism*, UK: Palgrave Macmillan.
- Suneki, Sri, *Dampak Globalisasi Terhadap Eksistensi Budaya Daerah*, Jurnal Civis Volume II, No. 1 Januari 2012.
- Winarno, Budi, 2008. *Politik Regionalisme Dan Tantangan Asean Di Tengah Arus Besar Globalisasi*, Jurnal Spektrum, Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional, UGM, Vol. 5, No. 2